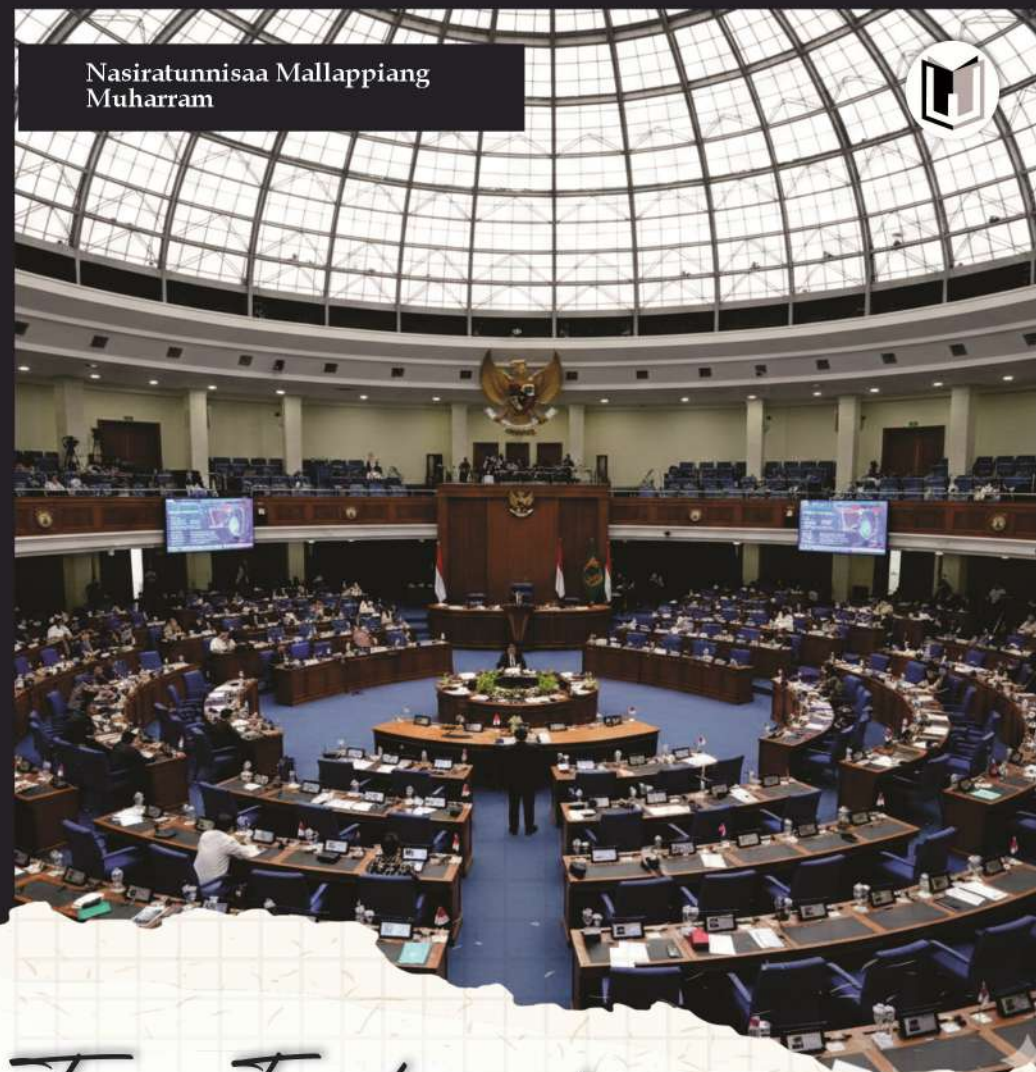


Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram



Teori Implementasi
**BIROKRASI DAN
GOOD GOVERNANCE
DI INDONESIA**

Teori Implementasi
**BIROKRASI DAN
GOOD GOVERNANCE
DI INDONESIA**

Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram

TEORI IMPLEMENTASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Tim Penulis:
Nasiratunnisaa Mallappiang, Muharram

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-246-594-3

Cetakan Pertama:
Januari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul “Teori Implementasi Birokrasi dan *Good governance* di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Buku ini disusun sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika implementasi kebijakan serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dalam kerangka pembangunan nasional, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas birokrasi sebagai pelaksana utama fungsi pemerintahan. Kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, Edward III, Lipsky, serta Sabatier dan Mazmanian memberikan landasan yang kokoh untuk memahami kompleksitas proses implementasi kebijakan, baik dari perspektif struktural maupun perilaku birokrat. Sementara itu, prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum menjadi dasar normatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berintegritas.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemerintahan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik implementasi birokrasi, sekaligus relevansinya dengan penerapan *good governance* di Indonesia. Meskipun telah diupayakan penyusunan secara sistematis dan komprehensif, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa saran ilmiah, bantuan teknis, maupun motivasi moral selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Makassar, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I SEJARAH IMPLEMENTASI BIROKRASI	
DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Masa Kolonial (Hindia Belanda): Akar Birokrasi Patrimonial	3
C. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1965): Pencarian Identitas Administrasi Negara	6
D. Masa Orde Baru (1966–1998): Sentralisasi Tinggi dan Awal Reformasi Administrasi	15
E. Era Reformasi (1998–2004): Titik Balik Menuju <i>Good governance</i>	18
F. Era Modern (2004–sekarang): Transformasi Birokrasi dan Penguatan <i>Good governance</i>	21
BAB II KONSEP DAN TEORI IMPLEMENTASI BIROKRASI	
DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA	27
A. Konsep Implementasi Birokrasi	27
B. Teori-teori Implementasi Kebijakan (Relevan untuk Birokrasi Indonesia).....	30
C. Konsep <i>Good governance</i>	47
D. Hubungan Implementasi Birokrasi dengan <i>Good governance</i>	51
E. Implementasi Birokrasi dan <i>Good governance</i> di Indonesia	56
BAB III STRUKTUR, FUNGSI, DAN PERAN	
BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN	65
A. Struktur Birokrasi dalam Sistem Pemerintahan	65
B. Fungsi Birokrasi dalam Sistem Pemerintahan	68
C. Peran Birokrasi dalam Sistem Pemerintahan	73
D. Tantangan Birokrasi dalam Menjalankan Struktur, Fungsi, dan Perannya	76

BAB IV PATOLOGI BIROKRASI DAN

ADMINISTRASI SERTA GOOD GOVERNANCE 83

- A. Pengertian Patologi Birokrasi dan Administrasi 83
- B. Bentuk-bentuk Patologi Birokrasi 85
- C. Penyebab Patologi Birokrasi 89
- D. Hubungan Patologi Birokrasi dengan *Good governance* 91
- E. Upaya Mengatasi Patologi Birokrasi melalui *Good governance* 93

BAB V REFORMASI BIROKRASI DAN

SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA..... 97

- A. Pengertian Reformasi Birokrasi 97
- B. Latar Belakang Reformasi Birokrasi di Indonesia 99
- C. Tujuan Reformasi Birokrasi di Indonesia 103
- D. Arah dan Kerangka Reformasi Birokrasi 106
- E. Reformasi Sistem Pemerintahan di Indonesia 111
- F. Tantangan dalam Reformasi Birokrasi 114
- G. Dampak Reformasi Birokrasi 120
- H. Reformasi Birokrasi dalam Kerangka *Good governance* 123

DAFTAR PUSTAKA 126

PROFIL PENULIS 129

BAB I

SEJARAH IMPLEMENTASI BIROKRASI DAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejarah implementasi birokrasi dan *good governance* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang pemerintahan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Birokrasi Indonesia mengalami transformasi dari model administratif kolonial yang bersifat patrimonial dan hierarkis, menuju model pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi masyarakat. Perubahan ini bersifat gradual dan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, serta tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi dan transformasi sistem pemerintahan di Indonesia merupakan bagian integral dari perubahan besar yang dimulai sejak periode Reformasi 1998. Pergeseran dari pemerintahan yang sangat sentralistik menuju model tata kelola yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel merupakan langkah fundamental dalam membangun pemerintahan modern. Reformasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga untuk membangun landasan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.

Pada era globalisasi yang menuntut efisiensi dan daya saing, birokrasi dituntut untuk bertransformasi menjadi organisasi publik yang inovatif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Pemerintah Indonesia merespons tuntutan ini melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain reformasi regulasi, digitalisasi pemerintahan, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), dan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan

BAB II

KONSEP DAN TEORI

IMPLEMENTASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

A. KONSEP IMPLEMENTASI BIROKRASI

Implementasi birokrasi merujuk pada proses dengan kebijakan pemerintah dijalankan melalui struktur, prosedur, dan perilaku aparatur negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi publik, birokrasi menjadi aktor utama dalam mengubah kebijakan dari bentuk *policy on paper* menjadi *policy in action*. Dengan kata lain, implementasi birokrasi adalah proses operasionalisasi kebijakan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan publik, regulasi, program, atau intervensi sosial.

Untuk memahami implementasi birokrasi secara lebih komprehensif, beberapa aspek lanjutan perlu dijelaskan, meliputi teori, dinamika hubungan antar aktor, serta tantangan implementasi pada sektor-sektor strategis.

1. Pengertian Implementasi Birokrasi

Secara umum, implementasi birokrasi dapat dipahami sebagai upaya terencana oleh aparatur pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan administratif dan pelayanan publik melalui mekanisme organisasi, sumber daya, dan prosedur yang telah ditentukan.

Konsep ini mencakup interaksi antara:

- Kebijakan (*policy*),
- Organisasi birokrasi,
- Pelaksana kebijakan (ASN), dan
- Masyarakat sebagai penerima manfaat.

BAB III

STRUKTUR, FUNGSI, DAN PERAN

BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

A. STRUKTUR BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi pemerintahan yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi berfungsi sebagai mesin administrasi negara yang menjalankan kebijakan publik serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan modern, struktur birokrasi menentukan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas implementasi kebijakan.

1. Pengertian Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola hubungan formal dalam organisasi pemerintahan yang menggambarkan:

- Tingkat hierarki,
- Pembagian kerja,
- Mekanisme koordinasi,
- Alur komando dan informasi,
- Peraturan dan prosedur kerja.

Menurut Max Weber, birokrasi ideal memiliki karakteristik:

- Hierarki yang jelas,
- Pembagian tugas spesifik,
- Aturan formal,
- Profesionalisme aparatur,
- Impersonalitas dalam pelayanan.

Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara teratur, konsisten, dan adil.

BAB IV

PATOLOGI BIROKRASI DAN ADMINISTRASI SERTA *GOOD GOVERNANCE*

A. PENGERTIAN PATOLOGI ADMINISTRASI DAN BIROKRASI

Secara etimologis, patologi berasal dari bahasa Yunani *pathos* (penyakit) dan *logos* (ilmu). Dalam ilmu administrasi, patologi dimaknai sebagai penyakit atau penyimpangan yang mengganggu fungsi sistem administrasi atau birokrasi. **Patologi administrasi** adalah segala bentuk penyimpangan, perilaku non-fungsional, atau kerusakan dalam proses administrasi yang membuat administrasi publik tidak berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Patologi administrasi dapat berupa:

- Maladministrasi,
- Ketidakprofesionalan,
- Penyalahgunaan prosedur,
- Ketidaktepatan pengelolaan administrasi,
- Perilaku aparaturnya yang tidak sejalan dengan nilai administrasi publik.

Patologi administrasi muncul ketika sistem administrasi tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip dasar administrasi yang benar.

Patologi birokrasi adalah kondisi ketika birokrasi menyimpang dari tujuan, fungsi, dan prinsip dasar birokrasi, sehingga menghambat efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

Patologi birokrasi terjadi ketika struktur, proses, maupun perilaku aparat birokrasi menimbulkan berbagai masalah seperti:

- Inefisiensi,
- Korupsi,
- Prosedur berbelit-belit,
- Penyalahgunaan kewenangan,

BAB V

REFORMASI BIROKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah suatu proses perubahan yang terencana, sistematis, dan menyeluruh untuk memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik birokrasi yang tidak sehat, meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Secara umum, reformasi birokrasi mencakup perubahan pada tiga aspek utama:

1. **Struktur birokrasi** → penyederhanaan organisasi, perbaikan tata kelola, dan pembenahan regulasi.
2. **Proses atau tata laksana** → digitalisasi layanan, penerapan SOP yang efektif, dan penyederhanaan prosedur.
3. **Sumber daya manusia aparatur** → peningkatan kompetensi, integritas, serta sistem merit dalam promosi dan mutasi.

Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya perubahan teknis, tetapi perubahan budaya kerja dan cara pandang aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Adapun pengertian reformasi birokrasi menurut para ahli dan lembaga sebagai berikut.

1. **Keban (2008)**: Reformasi birokrasi adalah perubahan menyeluruh yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.
2. **Dwiyanto (2015)**: Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2014). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, not steering*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Embang, E. J. P. H., Saleh, M. H., & Jamal, M. (2024). Reformasi birokrasi berbasis good governance pada kinerja Protokol Mahakam Ulu. *Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 15–27.
- Farazmand, A. (2002). *Modern bureaucracies: Forms and consequences*. Praeger.
- Fukuyama, F. (2013). *What is governance?* *Governance*, 26(3), 347–368.
- Goodsell, C. (2015). *The new case for bureaucracy*. SAGE Publications.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Gava Media.
- Kementerian PANRB. (2010). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian PANRB. (2018). *Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kumorotomo, W. (2019). *Akuntabilitas, etika, dan good governance*. UGM Press.

- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Makmur. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Rumampuk, F., Latif, F., Dumbela, U. S., & Noho, N. N. (2023). Perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN dalam era digitalisasi reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Kinerja*, 19(2), 112–125..
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Massachusetts: Addison-Wesley.
- Pasrani Mendrofa, H., Supriadi, B., Yustiari, S. H., Lubis, A. F., & Khairunnisa, M. (2023). Analisis efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(3), 201–212.
- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy* (6th ed.). Routledge.
- Rahman, M. T. (2012). *Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy and policy implementation*. Dorsey Press.
- Rodrik, D. (2000). *Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them*. *Studies in Comparative International Development*, 35(3), 3–31.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.
- Setiadi, A. (2022). Reformasi pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kepuasan publik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 2345–2356.
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, T. B. (1973). *The policy implementation process*. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
- Sulaiman, F., & Warsono, H. (2021). Good Governance di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112–129.

- Sulila, I., Ilato, R., & Santoso, I. R. (2024). Bureaucratic reform through public policy implementing quality dimensions in integrated licensing services. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–68.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wibawa, S., Yusriadi, W., & Darwin, M. (2009). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik: Analisis terhadap implementasi kebijakan. *Public Sector Governance Journal*, 3(1), 45–59.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2023). Dynamic governance as perspective in Indonesian bureaucracy reform: A qualitative analysis. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 133–145.
- Wijayanti, A. D., Augustinah, F., & Ferriswara, D. (2023). The role of bureaucratic reform in enhancing public service quality: Evidence from East Java. *Journal of Government and Public Affairs*, 6(2), 89–101.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank Publications.

PROFIL PENULIS



Nasiratunnisaa Mallappiang lahir di Ujung pandang, 6 Oktober 1984. Sarjana pada tahun 2007 di Universitas Fajar Makassar, Magister di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2020, dan Doktor dalam Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Pancasakti sejak tahun 2021 sampai sekarang. Nasiratunnisaa Mallappiang telah menulis Buku

dan jurnal, yaitu: (1) The Urgency Of Publik Communication Ethics In The Era Of Cyber Society, 2022, *Sinomics Journal*, Vol. 1. No. 5. (2) Policy Implementaation of Luwu Regional Library Develoment Policy, 2022, *Pinisi Discretion Review*, Vol. 5, Issue 2. (3) Challenges Of Social Sciences Education and Technology For Achieving Sustainable Develoment, 2022. (4) Keberadaan Humas Dalam Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Timur Makassar, 2021, *Jornal Governance and Politics (JGP)*. Vol. 1, No. 2. (5) Pengantar Manajemen Pelayanan Publik. Buku: Medan: Yayasan Kita Menulis. 2023. (6) Dasar-dasar Public Relation. Buku, Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023. (7) Communication Techniques for Persuasion of Students and Lecturers in Shaping Behavior. 2023. *SITEKIN: Journal Sains, Teknologi dan Industri*. Vol. 20. No. 2. (8) Accountability of Building Approval Services in Gowa District. 2023. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. Vol. 5. No. 10. (9) Strategies For Accountability Of Building Approval Services In Gowa Regency. 2023. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* Vol. 28. No. 9.



Muharram lahir di Pinrang, 7 Mei 1961, Guru Besar dalam bidang Kimia Organik di Universitas Negeri Makassar. Sarjana Pendidikan Kimia di IKIP Ujungpandang tahun 1987. Magister Sains pada bidang Kimia Organik pada tahun 1993 di ITB Bandung. Doktor dalam bidang Kimia Organik diperoleh pada tahun 2004 di Universitas Otto von Guericke Magdeburg Jerman. Publikasi Ilmiah: (1) Efficient Synthesis of Optically Active R- and S-2-Phenylpropanal. *PublScie-AEIF of Journal*; (2) Stereoselektivitas Reaksi Aldol dalam Sintesis C1-C12 Senyawa Epotilon. *J. Matematika & Sains*; (3) Sintesis (S)-3-asetil-4-isopropil-5,5-difenil-oxazolidin-2-on: Senyawa Auxiliari Efektif untuk Reaksi Aldol yang Selektif. *J. Chemica*; (4) Senyawa Metabolit Sekunder Anti Bakteri dari Tumbuhan *Lantara Camara* Linn (Verbanaceae). *Prosiding*. UNM Makassar; (5) The Antibacterial Properties of Bayur Tissues' Extract (*Pterospermum subpeltatum* C. B. Rob). *J. Teknologi*; (6) Screening of Tembelekan Plant (*Lantana* Active Compound for Prevention of infections. *Proceeding ICMSTE* Makassar UNM. (7) Communication Techniques for Persuasion of Students and Lecturers in Shaping Behavior. *SITEKIN: Journal Sains, Teknologi dan Industri*. Vol. 20. No. 2. Buku: (1) Senyawa Steroid dan Terpenoid. Makassar: CV Sahabat Hard. 2023. (2) Dasar-dasar Public Relation. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023. Partisipasi pada Pertemuan Ilmiah: (1) Seminar Internasional sebagai penyaji makalah dengan judul "Isolation and Characterisation of Neutral Compounds from *Artocarpus teysmanii* Miq.: An Original Plant of South Sulawesi Rainforest", di Manchester Inggris; (3) Seminar Internasional sebagai penyaji dengan judul "Isolation and Identification of β -Sitosterole Constituent from *n*-Hexane Extract of *Artocarpus teysmanii* Miq" di Makassar.

TEORI IMPLEMENTASI BIROKTASI DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Teori Implementasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia mengkaji secara komprehensif hubungan antara proses implementasi kebijakan publik, kinerja birokrasi, dan prinsip-prinsip good governance dalam konteks pemerintahan Indonesia. Implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kapasitas birokrasi sebagai pelaksana utama di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori implementasi birokrasi menjadi kunci untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini membahas berbagai teori implementasi kebijakan publik, mulai dari pendekatan top-down, bottom-up, hingga pendekatan hibrida yang menekankan interaksi antara aktor, struktur organisasi, dan lingkungan sosial-politik. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan diterjemahkan dari tingkat pusat ke daerah, serta bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

